



Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi
Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta)

Fr. Reni. Retno Anggraini

Univ. Sanata Dharma Yogya

Abstract

The objectives of this research observed the extent of disclosure about corporate social responsibility accounting and examined the determinants that are considered by corporate to disclose social responsibility accounting.

The data used in this research were pooling data for 1188 year-firms. I used all sectors that are published in Jakarta Stock Exchange 2000-2004. I observed three categories of corporate sustainability reporting from Darwin (2004). These categories are economic performance, environment performance, and social performance. Then I examined the factors that are considered by corporate to disclose social responsibility accounting. I identified five factors that may be considered. They are management ownership, leverage, size, industry type, and profitability.

The results of this study indicated that almost all companies disclosed the economic performance because PSAK 57 has been regulated. Management ownership and industry type were considered by corporate to disclose social responsibility accounting.

Kata Kunci: Social Responsibility Accounting, Management Ownership, Industry Type

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sejarah perkembangan akuntansi, yang berkembang pesat setelah terjadi revolusi industri, menyebabkan pelaporan akuntansi lebih banyak digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada pemilik modal (kaum kapitalis) sehingga mengakibatkan orientasi perusahaan lebih berpihak kepada pemilik modal. Dengan keberpihakan perusahaan kepada pemilik modal mengakibatkan perusahaan melakukan eksploitasi sumber-sumber alam dan masyarakat (sosial) secara tidak terkendali sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan alam dan pada akhirnya mengganggu kehidupan manusia. Kapitalisme, yang hanya berorientasi pada laba material, telah merusak keseimbangan kehidupan dengan cara menstimulasi pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki manusia secara berlebihan yang tidak memberi kontribusi bagi peningkatan kemakmuran mereka tetapi justru menjadikan mereka mengalami penurunan kondisi sosial [Galtung & Ikeda (1995) dan Rich (1996) dalam Chwastiak (1999)].

Di dalam akuntansi konvensional (*mainstream accounting*), pusat perhatian yang dilayani perusahaan adalah *stockholders* dan *bondholders* sedangkan pihak yang lain sering diabaikan. Dewasa ini tuntutan terhadap perusahaan semakin besar. Perusahaan diharapkan tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan pemilik modal (investor dan kreditor) tetapi juga karyawan, konsumen serta masyarakat. Perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap pihak-pihak di luar manajemen dan pemilik modal. Akan tetapi perusahaan kadangkala melalaikannya dengan alasan bahwa mereka tidak memberikan kontribusi terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini disebabkan hubungan perusahaan dengan lingkungannya bersifat *non reciprocal* yaitu transaksi antara keduanya tidak menimbulkan prestasi timbal balik.

Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin bagus (*good corporate governance*) semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan mengkonsumsi

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG

makanan dapat terpenuhi. Oleh karena itu dalam perkembangan sekarang ini akuntansi konvensional telah banyak dikritik karena tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat secara luas, sehingga kemudian muncul konsep akuntansi baru yang disebut sebagai *Social Responsibility Accounting (SRA)* atau Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial.

Owen (2005) mengatakan bahwa kasus Enron di Amerika telah menyebabkan perusahaan-perusahaan lebih memberikan perhatian yang besar terhadap pelaporan sustainabilitas dan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Isu-isu yang berkaitan dengan reputasi, manajemen risiko dan keunggulan kompetitif nampak menjadi kekuatan yang mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi sosial. Dari hasil studi literatur yang dilakukan oleh Finch (2005) menunjukkan bahwa motivasi perusahaan untuk melakukan pengungkapan sosial lebih banyak dipengaruhi oleh usaha untuk mengkomunikasikan kepada *stakeholder* mengenai kinerja manajemen dalam mencapai manfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang.

Standar akuntansi keuangan di Indonesia belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial terutama informasi mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, akibatnya yang terjadi di dalam praktik perusahaan hanya dengan sukarela mengungkapkannya. Perusahaan akan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh ketika mereka memutuskan untuk mengungkapkan informasi sosial. Bila manfaat yang akan diperoleh dengan pengungkapan informasi tersebut lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk mengungkapkannya maka perusahaan akan dengan sukarela mengungkapkan informasi tersebut.

Belkaoui (1989) menemukan hasil (1) pengungkapan sosial mempunyai hubungan yang positif dengan kinerja sosial perusahaan yang berarti bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas sosial akan mengungkapkannya dalam laporan sosial, (2) ada hubungan positif antara pengungkapan sosial dengan visibilitas politis, dimana perusahaan besar yang cenderung diawasi akan lebih banyak mengungkapkan informasi sosial dibandingkan perusahaan kecil, (3) ada hubungan negatif antara pengungkapan sosial dengan tingkat *financial leverage*, hal ini berarti semakin tinggi rasio utang/modal semakin rendah pengungkapan sosialnya karena semakin tinggi tingkat

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG

leverage maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit. Sehingga perusahaan harus menyajikan laba yang lebih tinggi pada saat sekarang dibandingkan laba di masa depan. Supaya perusahaan dapat menyajikan laba yang lebih tinggi, maka perusahaan harus mengurangi biaya-biaya (termasuk biaya-biaya untuk mengungkapkan informasi sosial).

Eipstein & Freedman (1994) menemukan bahwa investor individual tertarik terhadap informasi sosial yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Informasi tersebut berupa keamanan dan kualitas produk serta aktivitas lingkungan. Selain itu mereka menginginkan informasi mengenai etika, hubungan dengan karyawan dan masyarakat.

Hackston & Milne (1996) menyajikan bukti empiris mengenai praktik pengungkapan lingkungan dan sosial pada perusahaan-perusahaan di New Zealand serta menguji beberapa hubungan potensial antara karakteristik perusahaan dengan pengungkapan sosial dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan adanya konsistensi penelitiannya dengan penelitian yang sudah dilakukan di negara lain. Ukuran perusahaan dan industri berhubungan dengan jumlah pengungkapan sedangkan profitabilitas tidak. Interaksi antara ukuran perusahaan dan industri menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan yang lebih kuat antara perusahaan dalam industri yang *high-profile* dibandingkan dengan industri yang *low-profile*.

Atas dasar penelitian tersebut di atas, peneliti ingin mengetahui sejauh mana perusahaan menunjukkan tanggung jawabnya terhadap kepentingan sosial dengan memberikan informasi sosial serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial di dalam laporan keuangan tahunan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hasil penelitian ini akan memberikan jawaban apakah praktik pengungkapan informasi sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sosial dalam laporan keuangan tahunan di Indonesia konsisten dengan hasil yang ditemukan di negara lain.

1.2. Implikasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penyusunan standar akuntansi oleh penyusun standar akuntansi yang saat ini sedang bersama-sama dengan kementerian lingkungan hidup menyusun standar

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG

akuntansi lingkungan. Selain itu bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan dan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004). Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang disebut *Sustainability Reporting*. *Sustainability Reporting* adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). *Sustainability Reporting* meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan dan pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi (ACCA, 2004). *Sustainability report* harus menjadi dokumen strategis yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang *Sustainability Development* yang membawanya menuju kepada *core business* dan sektor industrinya.

Darwin (2004) mengatakan bahwa *Corporate Sustainability Reporting* terbagi menjadi 3 kategori yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial (lihat dalam Table 2.1). Sedangkan Zhegal & Ahmed (1990) mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan, yaitu sbb.:

1. Lingkungan, meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam, dan pengungkapan lain yang berkaitan dengan lingkungan.
2. Energi, meliputi konservasi energi, efisiensi energi, dll.
3. Praktik bisnis yang wajar, meliputi, pemberdayaan terhadap minoritas dan perempuan, dukungan terhadap usaha minoritas, tanggung jawab sosial.

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG

4. Sumber daya manusia, meliputi aktivitas di dalam suatu komunitas, dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan seni.
5. Produk, meliputi keamanan, pengurangan polusi, dll.

Grey et al. (1995) mengatakan bahwa sifat dan volume pelaporan mengenai pertanggungjawaban sosial perusahaan bervariasi antar waktu dan antar negara, hal ini disebabkan isu-isu yang dipandang penting oleh satu negara mungkin akan menjadi kurang penting bagi negara lain. Lewis & Unerman (1999) mengatakan bahwa variasi pelaporan tersebut disebabkan oleh budaya atau norma yang berlaku pada masing-masing negara.

Masukkan Tabel 1 di sini

Akuntansi pertanggungjawaban sosial (*Social Responsibility Accounting*) didefinisikan sebagai proses seleksi variabel-variabel kinerja sosial tingkat perusahaan, ukuran dan prosedur pengukuran, yang secara sistematis mengembangkan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja sosial perusahaan dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada kelompok sosial yang tertarik, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban sosial dapat memberikan informasi mengenai sejauh mana organisasi atau perusahaan memberikan kontribusi positif maupun negatif terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungannya [Belkaoui (2000) dalam Komar (2004)].

2.2. Pelaporan Informasi Sosial dan Pemilihan Kebijakan Akuntansi

Dalam penelitian akuntansi dibutuhkan penelitian terhadap hubungan bisnis dan masyarakat dalam rangka untuk mendefinisikan kembali peran dan tugas perusahaan dari ekonomi murni menuju ke institusi ekonomi sosial [Dierkes & Antal (1986), dalam Mangos & Lewis (1995)]. Mangos & Lewis (1995) mengatakan perlunya paradigma sosial-ekonomi untuk menganalisis pemilihan praktik akuntansi oleh manajemen. Mereka menyarankan perlunya pertimbangan terhadap faktor tanggung jawab sosial perusahaan ketika kita melakukan pengujian terhadap teori akuntansi positif (*positive accounting theory*). Dengan analisis ini maka akan dapat membantu manajemen memahami respon mereka terhadap masalah-masalah sosial-ekonomi dan hubungannya dengan nilai perusahaan.

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG

Pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dapat dijelaskan dengan menggunakan teori keagenan dari Jensen & Meckling (1976). Mereka mengatakan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara satu atau lebih orang (prinsipal) yang menghendaki orang lain (manajer) untuk melaksanakan jasa dengan cara mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Di dalam hubungan keagenan, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi yaitu biaya pengawasan (*monitoring costs*), biaya kontrak (*contracting costs*), dan visibilitas politis. Perusahaan yang menghadapi biaya pengawasan dan kontrak yang tinggi cenderung akan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan, dan perusahaan yang menghadapi visibilitas politis yang tinggi cenderung akan memilih metode dan teknik akuntansi yang dapat melaporkan laba menjadi lebih rendah.

Perusahaan melakukan pengungkapan informasi sosial dengan tujuan untuk membangun *image* pada perusahaan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Perusahaan memerlukan biaya dalam rangka untuk memberikan informasi sosial, sehingga laba yang dilaporkan dalam tahun berjalan menjadi lebih rendah. Ketika perusahaan menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah dan visibilitas politis yang tinggi akan cenderung untuk mengungkapkan informasi sosial. Jadi pengungkapan informasi sosial berhubungan positif dengan kinerja sosial, kinerja ekonomi dan visibilitas politis dan berhubungan negatif dengan biaya kontrak dan pengawasan [Belkaoui & Karpik (1989)].

Belkaoui & Karpik (1989) meneliti hubungan antara (1) pengungkapan informasi sosial dengan kinerja sosial, (2) pengungkapan informasi sosial dengan kinerja ekonomi (atas dasar variabel pasar dan akuntansi), (3) kinerja sosial dengan kinerja ekonomi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan informasi sosial (1) menunjukkan keikutsertaanya dalam kegiatan sosial, (2) memiliki risiko sistematis dan tingkat leverage yang rendah, dan (3) cenderung merupakan perusahaan yang berskala besar. Jadi pengungkapan informasi sosial berhubungan positif dengan kinerja sosial dan visibilitas politis serta berhubungan negatif dengan biaya kontrak dan pengawasan.

Berdasarkan teori keagenan, perusahaan yang menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah cenderung akan melaporkan laba lebih rendah atau

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG

dengan kata lain akan mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan manajemen (salah satunya biaya yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat).

2.2.1. Kepemilikan Manajemen

Konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil [Jensen & Meckling (1976)]. Dalam hal ini manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Sebaliknya semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut [Gray, et al. (1988)].

H₁: ada pengaruh positif jumlah prosentase kepemilikan manajemen dengan kebijakan pengungkapan informasi sosial.

2.2.2. Financial Leverage

Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Jensen & Meckling, 1976). Tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur [Schipper (1981) dalam Marwata (2001) dan Meek, et al (1995) dalam Fitriany (2001)] Oleh karena itu perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan ungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio *leverage* yang rendah. Pendapat lain mengatakan bahwa semakin tinggi *leverage*, kemungkinan besar perusahaan akan mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba di masa depan. Dengan laba yang dilaporkan lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang. Manajer akan memilih metode akuntansi yang akan memaksimalkan laba sekarang. Kontrak utang biasanya berisi tentang ketentuan bahwa perusahaan harus menjaga tingkat *leverage* tertentu (rasio utang/ekuitas), *interest coverage*, modal kerja dan ekuitas pemegang saham [Watt & Zimmerman (1990) dalam

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG

Scott (1997)]. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat *leverage* (rasio utang/ekuitas) semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi [Belkaoui & Karpik (1989)]. Supaya laba yang dilaporkan tinggi maka manajer harus mengurangi biaya-biaya (termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi sosial).

H₂: ada hubungan negatif antara pengungkapan informasi sosial dengan tingkat *leverage*.

2.2.3. Biaya Politis

Menurut hipotesis biaya politis, semakin besar biaya politis yang dihadapi oleh perusahaan, maka manajer akan memilih prosedur akuntansi yang dapat menghasilkan laba sekarang lebih rendah dibandingkan laba masa depan. Dengan demikian semakin tinggi biaya politis yang dihadapi perusahaan maka perusahaan akan semakin banyak mengeluarkan biaya untuk mengungkapkan informasi sosial sehingga laba yang dilaporkan menjadi lebih rendah [Watt & Zimmerman (1990) dalam Scott (1997)]. Perusahaan yang besar cenderung mempunyai biaya politis yang besar dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar cenderung akan memberikan informasi laba sekarang lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil, sehingga perusahaan besar cenderung akan mengeluarkan biaya untuk pengungkapan informasi sosial yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan dapat diproksikan dari nilai kapitalisasi pasar, total asset, log penjualan, dsb.

Perusahaan yang termasuk dalam industri yang *high-profile* akan memberikan informasi sosial lebih banyak dibandingkan perusahaan yang *low-profile*. Roberts (1992) dalam Hackston & Milne (1996) mendefinisikan industri yang *high-profile* adalah industri yang memiliki visibilitas konsumen, risiko politis yang tinggi, atau menghadapi persaingan yang tinggi. Preston (1977) dalam Hackston & Milne (1996) mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki aktivitas ekonomi yang memodifikasi lingkungan, seperti industri ekstraktif, lebih mungkin mengungkapkan informasi mengenai dampak lingkungan dibandingkan industri yang lain. Cowen, et al. (1987) dalam Hackston & Milne (1996) mengatakan bahwa perusahaan yang berorientasi pada konsumen diperkirakan akan memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban sosial karena hal ini akan meningkatkan *image* perusahaan dan mempengaruhi

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG

penjualan. Klasifikasi tipe industri oleh banyak peneliti sifatnya sangat subyektif dan berbeda-beda. Roberts (1992) dalam Hackston & Milne (1996) mengelompokkan perusahaan otomotif, penerbangan dan minyak sebagai industri yang *high-profile*. Sedangkan Diekers & Perston (1977) dalam Hackston & Milne (1996) mengatakan bahwa industri ekstraktif merupakan industri yang *high-profile*. Patten (1991) dalam Hackston & Milne (1996) mengelompokkan industri pertambangan, kimia dan kehutanan sebagai industri yang *high-profile*. Atas dasar pengelompokkan di atas, penelitian ini kemudian mengelompokkan industri konstruksi, pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, kimia, otomotif, barang konsumsi, makanan dan minuman, kertas, farmasi dan plastik sebagai industri yang *high-profile*.

H₃: ada hubungan positif antara pengungkapan informasi sosial dengan ukuran perusahaan dan tipe industri

2.2.4. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham [Heinze (1976) dalam Hackston & Milne (1996)]. Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial [Bowman & Haire (1976) dan Preston (1978) dalam Hackston & Milne (1996)]. Hackston & Milne (1996) menemukan tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat profitabilitas dengan pengungkapan informasi sosial. Belkaoui & Karpik (1989) mengatakan bahwa dengan kepeduliannya terhadap masyarakat (sosial) menghendaki manajemen untuk membuat perusahaan menjadi *profitable*. Vence (1975) dalam Belkaoui & Karpik (1989) mempunyai pandangan yang berkebalikan, bahwa pengungkapan sosial perusahaan justru memberikan kerugian kompetitif (*competitive disadvantage*) karena perusahaan harus mengeluarkan tambahan biaya untuk mengungkapkan informasi sosial tersebut.

H₄: ada hubungan positif antara pengungkapan informasi sosial dengan tingkat profitabilitas perusahaan.

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG

3. Metoda Penelitian

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang go publik di Bursa Efek Jakarta. Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling*. Kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

1. Sampel yang dipilih adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama tahun 2000-2004, sehingga perusahaan yang telah di-*delisting* dari bursa tidak dimasukkan sebagai sampel.
2. Perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel adalah perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan lengkap (termasuk catatan atas laporan keuangan).

Atas dasar kriteria tersebut di atas diperoleh sampel sebanyak 1188 tahun perusahaan. Ringkasan proses pemilihan sampel dapat dilihat pada table 2.

Masukkan Tabel 2 di sini

3.2. Variabel Penelitian

Faktor-faktor yang akan diuji pengaruhnya terhadap kebijakan perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi sosial adalah:

1. Prosentase Kepemilikan Manajemen (MAN)
Diukur dengan prosentase saham yang dimiliki manajemen.
2. Tingkat *Leverage* (LEV)
Diukur dengan rasio Utang/Ekuitas
3. Biaya Politis, yang diproksi dengan:
 - a. Ukuran Perusahaan (SIZE)
Diukur dengan kapitalisasi pasar
 - b. Tipe Industri (IND)

Variabel dummy, yaitu:

1 = Perusahaan yang termasuk dalam industri yang *high-profile*

0 = Perusahaan yang termasuk dalam industri yang *low-profile*

Kriteria untuk menentukan perusahaan dengan *high-profile* dengan *low profile* digunakan pengelompokkan menurut Roberts (1992), Preston (1977) dan Patten (1991) dalam Hackston & Milne (1996). Perusahaan-perusahaan yang

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG

termasuk dalam industri konstruksi, pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, kimia, otomotif, barang konsumsi, makanan dan minuman, kertas, farmasi dan plastik sabagai industri yang *high-profile*.

4. Profitabilitas (PM)

Diukur dengan *Net Profit Margin* (Laba bersih/Pendapatan)

3.3. Cara Penelitian

Analisis dilakukan dengan :

1. Mendeskripsikan pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan oleh perusahaan yang terdaftar di BEJ
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan informasi sosial digunakan model analisis regresi berganda, dengan bentuk persamaan sbb.:

$$IS_i = a + b_1MAN_i + b_2LEV_i + b_3SIZE_i + b_4IND_i + b_5PM_i + e$$

Keterangan:

IS_i = Jumlah informasi Sosial yang diungkapkan (berpedoman pada kategori informasi sosial menurut Darwin (2004))

MAN_i = Prosentase Kepemilikan Manajemen

LEV_i = Tingkat Leverage

$SIZE_i$ = Ukuran Perusahaan

IND_i = Tipe Industri

PM_i = Pofitabilitas

4. Analisis Data

4.1. Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan

Pengungkapan informasi sosial dikelompokkan menjadi 6 kelompok sesuai dengan kategori informasi sosial menurut Darwin (2004). Pada tabel 3 disajikan jumlah pengungkapan informasi sosial untuk setiap kelompok informasi dalam setiap industri.

Masukkan Tabel 3 di sini

Pada tabel 3 terlihat bahwa hampir semua perusahaan sampel mengungkapkan kinerja ekonominya. Pengungkapan kinerja ekonomi ini lebih banyak berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap karyawannya, yaitu dalam bentuk pemberian uang pesangon, pensiun, dan bonus. Pengungkapan ini dilakukan karena Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan surat keputusan No. Kep-150/Men/2000 tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian di perusahaan. Selain itu juga IAI mengeluarkan PSAK No. 57 tentang kewajiban diestimasi, kewajiban kontinjensi dan Aktiva kontinjensi yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2001, kemudian perusahaan harus mengestimasi kewajiban kontinjensinya termasuk pemberian pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti rugi karyawan.

Jika dilihat pada tabel 3, pengungkapan kinerja lingkungan masih sangat sedikit. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan juga belum ada aturan mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Pada perusahaan perbankan dan asuransi sebagian besar (lebih dari 50%) mengungkapkan informasi mengenai praktik kerja, yaitu informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dalam pengembangan sumber daya manusia. Hal ini bisa dimengerti bahwa industri ini sangat tergantung pada kemampuan manusia (karyawan) dalam memberikan jasanya kepada pelanggan.

Sebagian besar perusahaan juga sudah mengungkapkan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial, antara lain memberikan sumbangan serta tanggung jawab perusahaan terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini mungkin terjadi karena tuntutan sosial ekonomi masyarakat serta tingkat persaingan yang tinggi sehingga perusahaan harus menunjukkan perhatiannya yang besar kepada masyarakat.

4.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial

Pada tabel 4 disajikan hasil pengujian statistik untuk melihat pengaruh prosentase kepemilikan manajemen (MAN), Tingkat *Leverage* (LEV), biaya Politik,

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG

yang diproksi dengan ukuran perusahaan (SIZE) dan tipe industri (IND), terhadap kebijakan perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi sosial.

Hasil pengujian ini sudah memenuhi asumsi klasik, yaitu tidak ditemukannya multikolinearitas (nilai VIF untuk semua variabel berkisar adalah 1 dan tidak ada yang nilainya lebih dari 2), nilai Durbin Watson sebesar 1,851 artinya tidak ada otokorelasi (Alhusin, 2003:202), sedangkan hasil analisis plot residual terhadap nilai independen variabel menghasilkan nul plot, yang berarti tidak ada *heteroscedasticity* (Hair et al., 1998: 174).

Masukkan Tabel 4 di sini

Berdasar tabel 4 diatas terlihat bahwa hanya variabel prosentase kepemilikan manajemen (MAN) dan tipe industri (IND) yang berpengaruh signifikan terhadap kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan informasi sosial dengan arah sesuai dengan yang diprediksi. Semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan, manajer perusahaan akan semakin banyak mengungkapkan informasi sosial. Hal ini mendukung teori keagenan, yaitu bahwa semakin banyak kepemilikan manajemen di dalam perusahaan, manajemen akan semakin banyak melakukan kegiatan produktif yang dapat meningkatkan *image* perusahaan. Selain itu tipe industri juga berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan informasi sosial. Hal ini berarti bahwa industri yang *high-profile* yaitu industri yang memiliki visibilitas konsumen, risiko politis yang tinggi, atau menghadapi persaingan yang tinggi akan cenderung mengungkapkan informasi sosial yang lebih banyak dibandingkan industri yang *low-profile*. Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam industri yang *high-profile* lebih banyak diawasi oleh pemerintah dibandingkan perusahaan yang termasuk dalam industri yang *low profile*.

Penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap kebijakan pengungkapan informasi sosial oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Hackston & Milne (1996) yang tidak berhasil menemukan hubungan profitabilitas dengan pengungkapan informasi sosial perusahaan.

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG

5. Simpulan, Keterbatasan dan Saran

5.1. Simpulan

Hampir semua perusahaan mengungkapkan kinerja ekonominya, hal ini disebabkan oleh dikeluarkannya surat keputusan No. Kep-150/Men/2000 oleh Menteri Tenaga Kerja tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian di perusahaan. Serta dikeluarkannya PSAK No. 57 tentang kewajiban diestimasi, kewajiban kontinjensi dan Aktiva kontinjensi yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2001. Hal ini berarti perusahaan akan mengungkapkan informasi tertentu jika ada aturan yang menghendakinya. Sedangkan pada perusahaan perbankan dan asuransi sebagian besar (lebih dari 50%) mengungkapkan informasi mengenai pengembangan sumber daya manusianya dibandingkan dengan industri yang lain. Hal ini karena industri ini sangat tergantung pada kemampuan manusia (karyawan) dalam memberikan jasanya kepada pelanggan.

Perusahaan dengan kepemilikan manajemen yang besar dan termasuk dalam industri yang memiliki risiko politis yang tinggi (*high-profile*) cenderung mengungkapkan informasi sosial yang lebih banyak dibandingkan perusahaan lain.

5.2. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini hanya mengidentifikasi faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh emiten dalam mengambil kebijakan pelaporan pertanggungjawaban sosial dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Penelitian ini tidak menguji pengaruh pelaporan pertanggungjawaban sosial terhadap kinerja pasar dalam hal ini reaksi investor akan informasi tersebut, selain itu peneliti juga hanya melihat satu media pelaporan yaitu laporan keuangan.

Saran bagi peneliti berikutnya, pertama peneliti berikutnya dapat menguji pengaruh kebijakan pelaporan pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap kinerja pasar. Selain itu juga perlu dipertimbangkan penggunaan media pelaporan yang lain yang digunakan perusahaan untuk membuat pelaporan pertanggungjawaban sosial.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Alhusin, Sahri. 2003. *Aplikasi Statistik Praktis dengan SPSS. 10 for Windows*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Beets, S. Douglas and Christopher C. Souther. 1999. Corporate Environmental Reports: The Need for Standards and an Environmental Assurance Service. *Accounting Horizons*. Vol 13, No. 2, p. 129-145.
- Belkaoui, Ahmed and Philip G. Karpik. 1989. Determinants of the Corporate Decision to Disclose Sosial Information. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 2, No. 1, p. 36- 51
- Burritt, Roger L and Stephen Welch. 1997. Accountability for Environmental Performance of the Australian Commonwealth Public Sector. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 10, No. 4, p. 532-562.
- Chwastiak, Michele. 1999. Deconstructing the Pincipal-Agent Model: A View From the Bottom. *Critical Perspectives on Accounting*. Vol. 10, p. 425-441
- Darwin, Ali. 2004. Penerapan Sustainability Reporting di Indonesia. *Konvensi Nasional Akuntansi V, Program Profesi Lanjutan*. Yogyakarta, 13-15 Desember.
- Deegan, Craig and Michaela Rankin. 1997. The Materiality of Environmental Information to Users of Annual Reports. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 10, No. 4, p. 562-584.
- Ema. 2004. Penerapan Sustainability Reporting di Indonesia. *Konvensi Nasional Akuntansi V, Program Profesi Lanjutan*. Yogyakarta, 13-15 Desember.
- Eipstein, Marc J. and Martin Freedman. 1994. Sosial Disclosure and the Individual Investor. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 7, No. 4, p. 94-108
- Finch, Nigel. 2005. The Motivations for Adopting Sustainability Disclosure. Macquarie Graduate School of Management. *Social Science Research Network*.
- Fitriany. 2001. Signifikansi Perbedaan Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Wajib dan Sukarela pada Laporan Keuangan Perusahaan Publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi IV*. Bandung. 30-31 Agustus.
- Gallhover, Sonja and Jim Haslam. 1997. The Direction of Green Accounting Policy: Critical Reflections. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 10, No. 2, p. 148-174.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG

- Gray, Rob; Colin Dey; Dave Owen; Richard Evans and Simon Zadek. 1997. Struggling with the Praxis of Social Accounting: Stakeholders, Accountability, Audits and Procedures. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 10, No. 3, p. 325-364.
- Gray, Rob; Dave Owen and Keith Maunders. 1988. Corporate Social Reporting: Emerging Trends in Accountability and the Social Contract. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 1, No. 1, p. 6- 20
- Gray, Rob; Reza Kouhy and Simon Lavers. 1995. Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of Literature and a Longitudinal Study of UK Disclosure. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 8, No. 2, p. 47-77
- Gray, Rob; Reza Kouhy and Simon Lavers. 1995. Methodological Themes: Constructing a Research Database of Social and Environmental Reporting by UK Companies. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 8, No. 2, p. 78-101
- Hackston, David and Markus J. Milne. 1996. Some Determinants of Social and Environmental Disclosure in New Zealand Companies. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 9, No. 1, p. 77-108
- Hair, Joseph H., Rolph Anderson, Ronald L. Tatham dan William C. Black. 1998. *Multivariate Data Analysis*. Edisi 5. New ersey: Prentice Hall.
- Hill, Charles W.L. and Thomas M. Jones. 1992. Stakeholder-Agency Theory. *Journal of Management Studies*. Vol. 29, No. 2, p. 131-154.
- Hughes II, K.E. 2000. The Value Relevance of NonFinancial Mesures of Air Pollution in the Electric Utility Industry. *The Accounting Review*. Vol. 75, No. 2, p. 209-228.
- Jensen, M.C. and Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, dan Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Vol 3, p. 305-360.
- Jorgensen, Bjorn N. and Michael T. Kischenheiter. 2003. Discretionary Risk Disclosure. *The Accounting Review*. Vol. 78, No. 2, p. 449-469.
- Joshi, Satish; Ranjani Krishnan, and Lester Lave. 2001. Estimating the Hidden Cost of Environmental Regulation. *The Accounting Review*. Vo. 76, No. 2, Aapril, p. 171-198.
- Komar, Seful. 2004. Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial (Social Responsibility Accounting) dan Korelasinya dengan Akuntansi Islam. *Media Akuntansi*. Edisi 42/Tahun XI, hal. 54-58.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG

- Lehman, Glen. 1999. Disclosing New Worlds: A Role for Social and Environmental Accounting and Auditing. *Accounting, organizations and Society*. Vol. 24, p. 217-241
- Lewis, Linda and Jeffrey Unerman. 1999. Ethical Relativism: A Reason for Differences in Corporate Social Reporting. *Critical Perspectives on Accounting*. Vol. 10, p. 521-547
- Mangos, Nicholas C. and Neil R. Lewis. 1995. A Socio-Economic Paradigm for Analysing Managers' Accounting Choice Behaviour. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 8, No. 1, p. 38-62
- Mardiyah, Aida Ainul. 2002. Pengaruh Informasi Asimetri dan Disclosure terhadap Cost of Capital. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 5 No. 2, Mei, hal. 229-256.
- Marwata. 2001. Hubungan Antara Karakteristik Perusahaan dan Kualitas Ungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi IV*. Bandung. 30-31 Agustus.
- Mathews, M.R. 1997. Twenty-Five Years of Social and Environmental Accounting Research: Is there a Silver Jubilee to Celebrate? *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 10, No. 4, p. 481-531.
- Owen, David. 2005. CSR After Enron: A Role for the Academic Accounting Profession?. Working Paper. *Sosial Science Research Network*.
- Scott, William R. 1997. *Financial Accounting Theory*. New Jersey: Prentice Hall.
- Simanjuntak, Binsar H. dan Lusi Widiastuti. 2004. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 7, No. 3, September, hal. 251-366.
- Suharto, Harry. 2004. Standar Akuntansi Lingkungan: Kebutuhan Mendesak. *Media Akuntansi*. Edisi 42/Tahun XI, hal. 4-5.
- The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). 2004. *An Introduction to Sustainability Reporting for Organisations in Indonesia*.
- Uno, Kimio and Peter Bartelmus. 1998. *Environmental Accounting in Theory and Practice*. New Jersey: Kluwer Academic Publishers.
- Zeghal, Daniel and Sadrudin A. Ahmed. 1990. Comparison of Social Responsibility Information Disclosure Media Used by Canadian Firms. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 3, No. 1, p. 38-53

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG

Tabel 1. Kategori dalam Corporate Sustainability Reporting

Kategori	Aspek
Kinerja Ekonomi	
Pengaruh ekonomi secara langsung	Pelanggan, pemasok, karyawan, penyedia modal dan sektor publik
Kinerja Lingkungan	
Hal-hal yang terkait dengan lingkungan	Bahan baku, energi, air, Keanekaragaman hayati (<i>biodiversity</i>), emisi, sungai, dan sampah, pemasok, produk dan jasa, pelaksanaan, dan angkutan
Kinerja Sosial	
Praktik Kerja	Keamanan dan keselamatan tenaga kerja, pendidikan dan <i>training</i> , kesempatan kerja
Hak manusia	Strategi dan manajemen, non diskriminasi, kebebasan berserikat dan berkumpul, tenaga kerja di bawah umur, kedisiplinan, keamanan, dll.
Sosial	Komunitas, korupsi, kompetisi dan penetapan harga
Tanggung jawab terhadap produk	Kesehatan dan keamanan pelanggan, iklan yang peduli terhadap hak pribadi.

Sumber: Darwin (2004)

Tabel 2. Sampel

	2000	2001	2002	2003	2004
Total perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta	307	323	329	333	336
Total perusahaan yang datanya tidak lengkap	109	22	10	127	172
Total perusahaan yang datanya diperoleh secara lengkap	198	301	319	206	164
Total Sampel	1188				

Tabel 3. Pengungkapan Informasi Sosial

Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang mengungkapkan					
		KE	KL	PK	HM	S	TP
Agriculture, Forestry and Fishing	23	23	1	0	0	0	0
Animal Feed and Husbandry	29	29	0	6	0	18	7
Banking	89	89	1	51	0	15	27
Comunication	6	6	0	5	0	2	1
Construction	7	7	1	2	0	4	0
Credit Agencies and other than Bank	37	37	0	12	0	5	4
Holding and Other Investment Company	8	8	0	5	0	5	1
Hotel and Travel Services	22	21	1	12	0	6	9
Insurance	35	35	2	23	1	12	14
Manufacturing, Adhesive	15	15	1	6	0	4	3

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG

Tabel 3. Pengungkapan Informasi Sosial (lanjutan)

Manufacturing, Apparel and other Textiel Product	53	52	1	15	1	27	13
Manufacturing, Automotive and Allied Products	72	72	2	22	0	29	7
Manufacturing, Cable	21	0	3	0	0	7	5
Manufacturing, Cement	15	15	1	8	0	8	4
Manufacturing, Chemical and Allied Products	29	28	1	5	0	10	4
Manufacturing, Consumer Goods	15	15	0	5	0	3	0
Manufacturing, Electronic and Office Equipment	13	13	0	10	0	2	1
Manufacturing, Fabricated Metal Products	9	9	0	2	0	1	1
Manufacturing, Food & Beverage	72	72	2	15	0	29	13
Manufacturing, Machinery	9	9	0	3	0	5	5
Manufacturing, Metal and Allied Products	47	47	0	18	0	25	8
Manufacturing, Paper and Allied Products	19	19	0	4	0	6	4
Manufacturing, Pharmaceuticals	41	40	3	12	1	15	5
Manufacturing, Photo Equipment	10	10	0	6	0	3	2
Manufacturing, Plastics and Glass Products	56	54	0	18	0	28	17
Mining and Mining Service	34	34	11	7	0	17	3
Manufacturing, Stone, Clay, Glass and Concrete Products	19	18	0	9	0	10	5
Manufacturing, Textile mill Products	33	33	0	5	0	21	7
Manufacturing, Tobacco Manufacturers	14	14	2	3	0	6	3
Manufacturing, Lumber and Wood Products	19	19	3	3	0	7	11
Real Estate and Property	140	140	13	29	0	70	17
Securities	36	36	0	19	0	12	4
Transportation Services	33	33	0	10	0	10	0
Whole Sale and Retail Trade	44	44	0	20	0	15	7
Others	64	64	3	24	0	18	13

Keterangan:

KE= Kinerja Ekonomi

HM= Hak Manusia

KL= Kinerja Lingkungan

S= Sosial

PK= Praktik Kerja

TP= Tanggung Jawab terhadap Produk

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG

Tabel 4. Hasil Pengujian Statistik terhadap Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Kebijakan Pengungkapan Sosial

Model Summary ^b							
Model		R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1		.410 ^a	.168	.164	.148704	1.851	

a. Predictors: (Constant), IND, LEV, PM, SIZE, MAN
b. Dependent Variable: IS

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.267	5	1.053	47.634	.000 ^a
	Residual	26.137	1182	2.211E-02		
	Total	31.404	1187			

a. Predictors: (Constant), IND, LEV, PM, SIZE, MAN
b. Dependent Variable: IS

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.331	.006		59.003	.000		
	MAN	9.609E-02	.058	.044	1.652	.099	.991	1.009
	SIZE	6.099E-13	.000	.014	.508	.612	.994	1.006
	LEV	2.267E-05	.000	.024	.921	.357	.998	1.002
	PM	5.171E-04	.001	.018	.663	.508	.996	1.004
	IND	.142	.009	.408	15.366	.000	.998	1.002

a. Dependent Variable: IS